

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Lingkungan Hidup

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	3,00 indeks Ket.: IKA = 53.68 ; IKU = 84.37 ; IKL = 52.85	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/ kota		1,00 - Ket. : (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219 x IKL)
2	2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota	1,00 dokumen Ket.: Dokumen JAKSTRA DA (Kebijakan Strategis Daerah)	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/ kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/ kota	0,00 Ket. :
3	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	0,00	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar	0,00

	pemerintah daerah kabupaten/ kota	Ket.:	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/ Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Ket. :
2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	1,00 orang Ket.: atas nama Surono, S.T, M.M			
3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0,00 Ket.: Kab.Karan ganyar tidak MHA yang ditetapkan			
4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	1,00 lokasi Ket.: Sosialisasi kepada m asyarakat lereng Gunung Lawu terkait perl indungan dan penge lolaan lingkungan hidup			
5.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin	100,00 persen			

	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ kota yang ditangani	Ket.: 23 aduan tentang masalah lingkungan hidup telah ditindaklanjuti semua			
--	---	--	--	--	--

C. URUSAN PILIHAN

1. Kehutanan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0,00 - Ket.: Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan provinsi		0,00 Ket. : Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan provinsi
	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	1,00 lokasi Ket.: pembinaan kepada warga lereng Gunung Lawu		

		tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
3.	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0,00 - Ket.: Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan provinsi		
4.	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0,00 - Ket.: Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan provinsi		

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil